

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Ilmu akuntansi manajemen sangat diperlukan dalam sebuah perusahaan ataupun organisasi baik yang berorientasi laba maupun nirlaba, sehingga perusahaan atau organisasi tersebut dapat mengelola keuangan dengan baik. Pengelolaan keuangan yang baik dengan menggunakan ilmu akuntansi manajemen juga sangat bermanfaat untuk dapat digunakan dalam sebuah pengambilan keputusan (Halim dan Supomo, 2000: 3). Menurut National Association of Accountants (NAA) dalam Ikhsan dan Prianthara (2009: 138), Bahwa akuntansi manajemen merupakan suatu proses identifikasi, pengukuran, pengumpulan data, analisis, penyiapan, dan komunikasi informasi finansial yang digunakan manajemen untuk sebuah perencanaan, evaluasi, pengendalian dalam suatu organisasi atau perusahaan, dan menjamin ketepatan penggunaan sumber dan pertanggungjawaban atas segala sumber anggaran.

Anggaran sangat diperlukan untuk menjalankan operasional suatu instansi atau organisasi demi mencapai tujuan yang direncanakan untuk masa yang akan datang. Seperti yang dikemukakan Basri (2013), anggaran merupakan rencana keuangan masa datang yang mencakup harapan manajemen terhadap pendapatan biaya, dan transaksi keuangan lain dalam masa satu tahun. Anggaran bisnis harus memiliki perkiraan volume unit

produksi atau penjualan, unit biaya produksi dan harga satuan penjualan untuk jangka waktu tertentu (Amakobe, 2017 dalam Ross, Westfield & Jordan, 2016).

Secara garis besar tujuan organisasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: memperoleh laba (bisnis) sedangkan yang lainnya adalah nirlaba. Nirlaba adalah istilah yang biasa digunakan sebagai sesuatu yang bertujuan sosial, kemasyarakatan atau lingkungan yang tidak semata-mata untuk mencari keuntungan materi (uang) (Yuliarti, 2014). Definisi organisasi nirlaba adalah organisasi yang bersasaran pokok untuk mendukung suatu isu atau perihal didalam menarik perhatian publik untuk suatu tujuan yang tidak komersil, tanpa ada perhatian terhadap hal-hal yang bersifat mencari laba (moneter). Organisasi nirlaba meliputi gereja, sekolah negeri, derma politik, rumah sakit dan klinik publik, organisasi politis, bantuan masyarakat lainnya (Tinungki & Pusung, 2014).

Dari begitu banyaknya jenis organisasi nirlaba yang ada di Indonesia salah satunya adalah panti asuhan. Departemen Sosial RI (2004:4) menyatakan panti sosial asuhan anak adalah suatu lembaga kesejahteraan sosial yang mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kesejahteraan sosial pada anak terlantar dan melaksanakan penyantunan dan pengentasan anak terlantar, memberikan pelayanan pengganti orang tua/wali anak dalam memenuhi kebutuhan fisik, mental dan sosial kepada anak asuh sehingga memperoleh kesempatan yang luas, tempat dan memadai bagi

pengembangan kepribadiannya sesuai dengan yang diharapkan sebagai bagian dari penerus cita-cita bangsa dan sebagai insan yang akan turut serta aktif dalam bidang pembangunan nasional.

Pelayanan sosial yang diselenggarakan oleh panti-panti sosial masyarakat merupakan wujud nyata dari peran serta masyarakat dalam pembangunan kesejahteraan sosial. Hal ini sesuai dengan amanat undang-undang nomor 6 tahun 1974 tentang ketentuan-ketentuan pokok kesejahteraan sosial pasal 1, yaitu: "*Setiap warga Negara berhak atas taraf kehidupan sosial yang sebaik-baiknya dan berkewajiban untuk sebanyak mungkin ikut serta dalam usahakesejahteraan sosial*". Kemudian ditegaskan pada pasal 8, yaitu: "*Masyarakat mempunyai kesempatan seluas-luasnya untuk mengadakan usaha kesejahteraan sosial dengan mengindahkan garis kebijakan dan ketentuan-ketentuan sebagaimana ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan*".

Panti asuhan merupakan sebuah organisasi nirlaba yang bergerak dalam pelayanan dan penyantunan terhadap anak yatim, yatim piatu, keluarga retak, dan anak terlantar dengan cara memenuhi segala kebutuhan, baik berupa material maupun spiritual, yang meliputi sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya. Dari operasional organisasi ini dikategorikan dalam organisasi nirlaba yang tujuan yang tujuan utamanya tidak semata-mata untuk mendapatkan keuntungan (Sujarweni, 2015: 215).

Menurut Agustin (2016), beberapa penyebab ketelantaran anak adalah sebagai berikut. 1) Orang tua meninggal dan atau tidak ada sanak keluarga yang merawatnya sehingga anak menjadi yatim piatu. 2) Orang tua tidak mampu (sangat miskin) sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan minimal anak-anaknya. 3) Orang tua tidak dapat dan tidak sanggup melaksanakan fungsinya dengan baik atau dengan wajar dalam waktu relative lama misalnya menderita penyakit.

Demi mencapai tujuan tersebut dalam periode tertentu panti asuhan harus memiliki anggaran sebagai penunjang dalam hal mencapai tujuan maupun fungsi organisasi kedepan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Eqbunike (2014) dalam Amakobe (2017), anggaran adalah rencana yang komprehensif dan terkoordinasi dinyatakan dalam istilah keuangan untuk operasional suatu perusahaan atau organisasi untuk beberapa periode tertentu di masa depan.

Untuk menjalankan operasional sebuah organisasi nirlaba seperti panti asuhan diperlukan empat cara dalam hal manajemen yaitu: 1) *Planning*, diperlukan sebagai dasar penentuan penganggaran untuk operasional suatu organisasi. 2). *Organizing*, adalah proses memastikan kebutuhan sebuah organisasi dalam menjalankan dan mencapai tujuan organisasi tersebut. 3). *Actuating*, adalah pelaksanaan dari apa yang telah direncanakan sebelumnya. 4). *Controlling*, diperlukan agar apa yang dilaksanakan sesuai dengan apa yang direncanakan sebelumnya Terry dalam Liang Gie (2000: 21)

Organisasi nirlaba memperoleh sumber daya dari sumbangan para anggota dan para penyumbang lain yang tidak mengharapkan imbalan apapun dari organisasi tersebut (Ikatan Akuntan Indonesia, 2004:45). Ada berbagai sumber pendapatan baik itu di perusahaan swasta maupun instansi sektor publik. Untuk di perusahaan swasta pendapatan berasal dari penjualan barang atau jasa, sumbangan dari donatur, dan pinjaman. Sedangkan untuk sektor publik pendapatan dapat berasal dari pajak, retribusi, hibah, bantuan, dan dana bagi hasil akan tetapi adapula istilah pendapatan reguler dan non reguler (Agustin, 2016).

Pendapatan reguler merupakan pendapatan yang berasal dari usaha suatu instansi baik swasta maupun pemerintah, sedangkan pendapatan non reguler adalah pendapatan yang berasal dari luar usaha instansi baik itu berupa hibah, maupun sumbangan atau bantuan. Untuk mengetahui jumlah anggaran yang diperoleh dan anggaran yang dikeluarkan maka diperlukan pengelolaan anggaran yang baik.

Dalam hal pengelolaan anggaran, para donator biasanya mensyaratkan adanya pelaporan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan organisasi nirlaba atas anggaran yang diberikan demi menghindari adanya tindakan manipulasi data sehingga anggaran yang diberikan digunakan sebagaimana peruntukannya. Hal ini sangat penting untuk dilakukan untuk dapat memberikan kepercayaan kepada pemberi anggaran tersebut bahwa

anggaran yang diberikan dikelola dengan baik oleh pihak pengurus panti asuha.

Walaupun pada kenyataannya, keseluruhan anggaran yang diberikan tidak berbanding lurus dengan anggaran yang dikeluarkan oleh pengurus panti asuhan untuk membiayai kebutuhan anak asuh dan juga menjalankan program yang direncanakan oleh pihak pengurus panti asuhan. Seperti dalam pembiayaan makan sehari-hari anak asuhnya yang jumlahnya tentu tidak sedikit ditambah lagi dengan harga bahan pokok yang kadang jadi mahal.

Permasalahan ini tentunya membutuhkan proses manajemen yang baik sehingga walaupun kekurangan anggaran panti asuhan tetap dapat menjalankan operasionalnya. Salah satunya panti asuhan Harapan Kita yang nantinya akan dijadikan studi penelitian itu tetap mampu bertahan dan menjalankan operasionalnya, bahkan sudah mampu membuat satu usaha penjualan barang harian. Hal ini dilakukan demi untuk menutupi kekurangan agar panti asuhan dapat memenuhi kebutuhan anak asuhnya dan juga dapat menjalankan operasional organisasinya.

Studi yang menyeluruh dan lengkap tentang panti asuhan, khususnya tentang sistem pengelolaan anggaran pada panti asuhan belum ada yang melakukannya. Kecuali yang telah dilakukan oleh Luh Gede Ria Utami Agustin (2016) itupun hanya tentang Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Panti Asuhan (Studi Pada PSAAUdyana Wiguna Singaraja). Penelitian ini mendapatkan hasil bahwa proses perolehan sumber dana pada

panti asuhan anak dimulai dari dibentuknya RKA (Rencana Kerja Anggaran) oleh seluruh staf panti asuhan yang selanjutnya akan dikirim ke UPT pelayanan sosial untuk dikoreksi dan diserahkan kepada Dinas sosial provinsi Bali. Dinas sosial Bali selanjutnya akan menyerahkan RKA kepada Biro Keuangan Provinsi Bali untuk selanjutnya dibuatkan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) sebagai pedoman untuk melaksanakan pengelolaan keuangan di PSAA Udyana Wiguna Singaraja. Dalam menjaga akuntabilitasnya PSAA Udyana Wiguna Singaraja melaksanakan tahapan pelaksanaan yaitu perencanaan, penyusunan, pelaksanaan dan dipertanggungjawabkan dalam bentuk laporan keuangan panti asuhan.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh peneliti, ditemukan bahwa panti asuhan Harapan Kita mengasuh anak sebanyak 45 anak, panti asuhan ini juga mendapat anggaran dari sektor publik, dan juga mendapat bantuan anggaran dari sektor swasta atau donator. Dan yang mengurus segala bentuk perencanaan dan pengelolaan panti asuhan dilakukan oleh ketua panti sekaligus pendiri panti asuhan tersebut. Hal ini dapat dibuktikan dari hasil wawancara dengan salah satu pihak pengurus panti asuhan Harapan Kita yang bernama Ibu Eflin Panigoro, beliau mengatakan:

“Panti Asuhan ini tentu dapat anggaran dari pemerintah, namun karena kadang anggaran itu masih kurang cukup untuk memenuhi kebutuhan anak asuhnya dan operasional organisasi panti asuhan ini juga mencari anggaran dari para donator dan segala urusan tentang pengelolaan panti asuhan dilakukan oleh ketua asuhan dan para anggotanya yang lain tinggal menunggu perintah atau arahan dari beliau bahkan untuk penyusunan

rincian biaya ti oma yang melakukan tanpa melalui rapat dengan anggota tapi dalam pencairan proposal yang diajukan tidak semua dibiayai”

Berdasarkan pernyataan di atas, bahwa Panti Asuhan Harapan Kita selain mendapat anggaran dari sektor publik (Pemerintah) juga mendapat anggaran dari sektor swasta (Donatur) sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan dan dan menjalankan operasional panti asuhan tersebut. Pemenuhan kebutuhan untuk pengajuan permohonan anggaran ke Dinas Sosial Provinsi tidak semua dipenuhi. Maka ini yang mengundang peneliti untuk meneliti pengelolaan keuangan panti asuhan sebab sebagaimana penuturan informan diatas bahwa untuk perencanaan dan pengelolaannya dilakukan tanpa melalui rapat tapi hanya dilakukan oleh 1 orang yakni ketua sekaligus pendiri panti asuhan tersebut.

Hal ini membuat peneliti untuk meneliti dengan judul **“Sistem Pengelolaan Anggaran Pada Panti Asuhan Harapan Kita Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah sistem pengelolaan anggaran Pada Panti Asuhan Harapan Kita Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan di atas, maka tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan sistem pengelolaan anggaran pada Panti Asuhan Harapan Kita Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dari berbagai pihak, yaitu:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan akan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan pengelolaan anggaran, serta dapat dijadikan referensi untuk peneliti selanjutnya yang ingin meneliti sistem pengelolaan anggaran pada Panti Asuhan.

#### **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan manfaat 1) sumbangsih tentang sistem pengelolaan anggaran dalam mata kuliah Akuntansi Manajemen, 2) dijadikan informasi dan pertimbangan bagi pemerintah daerah agar mengalokasikan kembali dana APBD untuk penganggaran pada Panti Asuhan sesuai dengan yang dibutuhkan.